

Jurnal Sejarah. Vol. 1(2), 2018: i – ii

© Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

PENGANTAR

Dalam *Runtuhnya Hindia Belanda* (1989), Onghokham telah mengemukakan pandangan menarik yang terjadi selama empat dekade akhir kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia. Menurutnya, sepanjang periode tersebut telah berkembang apa yang disebutnya sebagai “gejala perkotaan” yang mewakili “berbagai kehidupan ‘kota’ yang baru” dengan “golongan kota” yang melahirkan kebudayaan baru diwakili pengusaha, pedagang kecil, tukang dan buruh (*kleine Middenstand*), pegawai pemerintah, dan pekerja profesional lulusan sekolah model pendidikan Barat. Onghokham melihat bahwa kaum pergerakan sangat memperhatikan “kedudukan ekonomi orang-orang Indonesia ini dan pada pokoknya golongan-golongan itu,” tulisnya. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa “Salah satu strategi pergerakan terpenting pada dekade 1930an ...adalah memenangkan (dukungan) golongan kota Indonesia dan memperkuat kedudukannya dalam hal ekonomi.” Persoalannya pun bukan sekedar bagaimana memenangkan dukungan golongan menengah perkotaan bagi politik kaum nasionalis saat itu, tetapi juga karena “banyak aktivis, bila mungkin bukan tokoh-tokohnya yang berasal dari golongan kota ini. Banyak sekali jumlah pemimpin atau aktivis di cabang-cabang, di pergerakan buruh-buruh, atau di kependuan, dan lain-lain yang berasal dari golongan kota ini (Onghokham, 1989: 100-102).

Kota-kota kolonial di Hindia Belanda awal abad ke-20 tidak dapat disangkal telah menjadi panggung baru dalam perkembangan sejarah Indonesia. Ia bukan sekedar pemukiman modern baru yang muncul atas kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga merupakan basis sebuah peradaban dan teknik baru yang muncul dalam sejarah modern. Di dalamnya terdapat pengalaman-pengalaman sosial, politik dan ekonomi yang berbeda, termasuk ketegangan serta pertentangan kepentingan di antara penduduk yang bermukim di dalamnya. Kesadaran yang muncul di kalangan penduduk bumiputera sebagai “golongan kota” bagaimanapun tidak diikuti dengan kesadaran para pejabat kolonial terhadap keberadaan warga bumiputera sebagai warga kota. “Urbanisasi di kalangan pribumi berada di luar imajinasi para pembuat kebijakan Belanda,” seperti disampaikan Thee Siauw Giap dan Wertheim dalam tulisannya tentang perubahan sosial di Jawa. Bahkan van Deventer, seorang politisi liberal di parlemen Belanda dan juru bicara kemajuan masyarakat pribumi, sempat mengabaikan keberadaan orang-orang pribumi ketika membahas politik desentralisasi di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang dan Surabaya. Baru satu dekade kemudian ia memandang pentingnya memperhatikan penduduk pribumi, baik kalangan elite dan masyarakat bawah, dalam kebijakan tata kota di Hindia Belanda (Giap & Wertheim, 1962: 231-232).

Romantisme kolonial senantiasa memandang koloni mereka sebagai lingkungan hidup agraris yang tidak mengalami perubahan. Seorang penulis Belanda menggambarkan betapa ia kehilangan desa-desa di

Jawa yang dalam benak kanak-kanaknya mewakili “kebebasan...kenyamanan...pohon waringin yang keramat...keselarasan...” (Mrazek: 75). Memasuki abad kedua puluh, romantisme itu perlahan harus menghadapi kenyataan tentang Hindia Belanda yang berubah. Hanya dibutuhkan waktu selama tiga dekade di Hindia Belanda untuk memunculkan kota-kota baru dengan penduduk di atas 100.000 jiwa. Sensus tahun 1930 menyebutkan bahwa Batavia telah berkembang menjadi kota besar dengan jumlah penduduk mencapai 533,000 jiwa, yang merupakan lima kali lipat pertumbuhan penduduk dibanding tiga dekade sebelumnya. Begitu juga yang terjadi di tempat lainnya seperti Surabaya (341.000 jiwa), Semarang (217.800 jiwa), Bandung (166.800 jiwa), Surakarta (165.000 jiwa) dan Yogyakarta (136.500) jiwa. Belum termasuk dalam hitungan statistik ini adalah perkembangan kota-kota kecil dengan jumlah penduduk melebihi angka 50.000 jiwa dan jumlah penduduk musiman dari wilayah-wilayah pinggiran yang tinggal di perkotaan sesuai ketersediaan lapangan kerja. Ringkasnya, angka-angka itu menunjukkan bagaimana dalam waktu satu generasi kota-kota di Jawa berkembang dari kota kecil menjadi kota besar di luar bayangan para perencana kolonial sendiri. Sensus tahun 1930 juga menunjukkan bahwa setengah jumlah total orang-orang Indonesia yang menetap di Batavia, Bandung dan Surabaya, adalah orang-orang yang lahir di wilayah perkotaan dan sisanya dilahirkan di provinsi-provinsi yang memiliki kota-kota besar (Volkstelling, 1930).

Meski angka-angka telah berbicara tentang sebuah perubahan yang terjadi di Hindia, tetapi perkembangan itu tidak mengubah pandangan kolonial tentang tidak adanya sifat kota dalam kehidupan masyarakat pribumi. Gagasan tentang koloni sebagai masyarakat agraris pun menjadi pembenaran bagi pemerintah kolonial saat itu bagi penerapan standar berbeda tentang ukuran kesejahteraan masyarakat pribumi dan kebijakan pengupahan bagi orang-orang pribumi yang bekerja di sektor modern. Ketika krisis ekonomi dunia melanda Hindia Belanda pada tahun 1930an, pemerintah menggunakan paradigma itu sebagai cara menghindari beban tanggungan terhadap kemerosotan dan kemiskinan yang dialami penduduk perkotaan sepanjang tahun-tahun krisis. Kebijakan itu pada akhirnya mengundang kemarahan aktivis pergerakan nasional. Sukitman, yang kemudian menjadi pemimpin penting dalam pergerakan Islam dalam politik nasionalisme Indonesia, melontarkan kritik tajam dalam tulisannya di harian *Moestika* yang terbit di Yogyakarta terhadap pandangan kantor perburuhan yang menyatakan “Kalau dipetjat pekerdja’annya maka mereka tinggil di desa, di mana mereka dipelihara oleh keluarganya, dan bekerdja di sawah memetik padi ...” Lebih lanjut ia mempertanyakan pandangan itu dengan menyatakan “Bagaimana orang penganggur akan dapat nafkah di desa-desa itu, djika desanja sendiri sudah bergantung kebanjakan orang, kosong makanan dan pekerdjaan?” (*Moestika*, 17 Juli 1931, dikutip dari Ingleson, 2014: 148).

Serangkaian artikel dalam *Jurnal Sejarah* edisi kali ini menampilkan gambaran sejauh mana perubahan kehidupan perkotaan terjadi di Indonesia. Kenyataan bahwa kota adalah sebuah lingkungan kecil di dalam lautan kehidupan perdesaan bukan berarti tidak ada pengalaman sejarah penting yang layak untuk diungkap. Norman Joshua menyampaikan dalam tulisannya tentang kehidupan “kota minyak” di tiga kota, Pangkalan Brandan, Palembang, dan Balikpapan, dan menawarkan bagaimana kebijakan rezim kolonial dalam menata industri dan kerja dilakukan di masing-masing kota tersebut. Artikel Wildan Sena Utama tentang propaganda antikolonial kaum pergerakan nasionalis Indonesia di Paris memberi gambaran menarik pula sifat global dan kosmopolitan pergerakan antikolonial saat itu. Selanjutnya, uraian Ilham Daeng Makkelo tentang Kota Makassar, Junaidi Nasution tentang Kota Medan dan Teguh Andrew tentang para pelajar Batak di Batavia memberikan gambaran menarik pengalaman baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia di dalam lingkungan kota modern. Redaksi berharap artikel-artikel ini dapat memperkaya penulisan sejarah tentang perkotaan di Indonesia.

Editor